

## Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2898 - 2904

## EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Research & Learning in Education https://edukatif.org/index.php/edukatif/index



## Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

# Dedi Wandra<sup>1⊠</sup>, Hadiyanto<sup>2</sup>

Universitas Negeri Padang, Indonesia<sup>1,2</sup> E-mail: dediwandra10@gmail.com<sup>1</sup>, hadiyanto@fip.unp.ac.id<sup>2</sup>

#### Abstrak

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam mendukung penyelenggaraaan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional dalam pendidikan tersebut mulai dari hal paling kecil hingga yang paling besar. Pembiayaan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan pada kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan proses belajar mengajar, pemeliharaaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaaan kesiswaan, peningkatan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi perencanaan pembiayaan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan kualitatif yang di fokuskan pada penentuan perencanaan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses pembelajaran di sekolah akan berjalan dan terlaksana secara maksimal apabila tujuan akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan.

**Kata Kunci:** Perencanaan, pembiayaaan, dan pendidikan.

## Abstract

Education financing is one of the important things in supporting the implementation of education because it involves the operational financing in education starting from the smallest thing to the biggest thing. Educational funding is urgently needed for operational needs and school administration based on real needs consisting of salaries, employee welfare, improvement of the teaching and learning process, maintenance and procurement of facilities and infrastructure, improvement of student development, professional improvement of teachers, school administration and supervision. The purpose of this study was to determine the school financing planning strategy. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques by observation and documentation. This research is a qualitative one that focuses on determining education financing planning. Education financing has a very important role in the ongoing education process, financing as a supporting factor. The learning process in schools will run and be carried out optimally if the goals to be achieved meet the requirements that have been determined in accordance with the plan.

Keywords: planning, financing, and education.

Copyright (c) 2021 Dedi Wandra, Hadiyanto

⊠ Corresponding author

Email : <a href="mailto:dediwandra10@gmail.com">dediwandra10@gmail.com</a> ISSN 2656-8063 (Media Cetak)
DOI : <a href="https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1005">https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1005</a> ISSN 2656-8071 (Media Online)

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan hak setiap individu dan sebagai pengembangan sumber dayamanusia agar dapat menjadi manusia lebih bermoral dan berpengetahuan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut.

Tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri membutuhkan pendidikan yang bermutu. Tercapainya standar nasional pendidikan merupakan faktor penentu dalam pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan tersebut diantaranya ialah standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut, sekolah membutuhkan pembiayaan yang cukup. Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun dan terdiri atas biya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Untuk itu diperlukan perencanaaan yang matang demi memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan pendidikan. Perencanaan berarti upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan sangat membantu dalam menentukan tujuan dalam pencapaian pembiayaan di sekolah terkait dengan opersional pendidikan. Pada hakikatnya perencamnaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses pembelajaran di sekolah akan berjalan dan terlaksana secara maksimal apabila tujuan akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah juga berupaya dalam peningkatan mutu pendidikan salah-satunya melalui pembiayaan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagainya. Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan yang saling berkaitan didalamnya terdapat komponen mikro dan makro pada satuan pendidikan. setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda namun memiliki tujuan akhir yang sama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan bertujuan menggambarkan kondisi di lapangan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang essensial dan penting bagi dunia pendidikan maka pendekatan ini lebih tepat digunakan. Lokasi penelitian dilaksanakan di MTsN 4 Pasaman yang beralamat di Jalan Kp. Talang No.25 Kenagarian Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Untuk kelengkapan bahan, peneliti juga melakukan studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur (bahan-bahan atau materi) yang bersumber dari buku, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai human instrumen,dalam rangka mencari data dan informasi langsung dari sumber nya, dengan menangkap berbagai fenomena yang terjadi dilapangan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini berarti adanya pemerataaan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 % dari anggaran belanja negara seperti yang tertuang dalam pasal 31 ayat 4. Namun pada kenyataannya belum semua anak-anak di Indonesia memeperoleh pendidikan yang layak hal ini terjadi disebabkan salah-satunya oleh mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Dengan keadaan demikian maka terbentuklah klausal masalah pendidikan dalam amandemen UUD 1945 agar dapat memperoleh pelayanan pendidikan seperti yang dicanangkan oleh Kemdiknas dengan misi: ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas haruslah berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan karena pada hakikatnya biaya pendidikan yang dikeluarkantersebut memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Adapun salah-satu dasar hukum yang mengatur tentang standar pembiayaan pendidikan diantaranya PP No. 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa perlunya penyusunan standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan seperti biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal.

Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi dan sasaran bagi pelaksananya. Kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat dewasa ini seperti masalah jumlah penduduk, kebutuhan tenaga kerja, masalah lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam.

Pengertian perencanaan juga adalah suatu proses intelektual yang didalamnya akan menentukan tujuan seorang individu, organisasi, atau perusahaan, dan juga mengembangkannya ke dalam berbagai tindakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut.Hal ini dikarenakan setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbedabeda. Perencanaan sangat ditentukan oleh cara, sifat dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampak terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya seperti tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan,masalah strategi termasuk penanganan kebijakan secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. mulyadi mengemukakan bahwa dalam biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk tujuan tertentu. Secara sempit diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orangorang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah- langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Semua itu menjadi arah dan panduan dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, pengerahan dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang proses pencapaia tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian tentang pencapaian tujuan. Dengan adanya rencana yang komperhensif, terintegrasi dan berdasarkan pemilihan strategi maka akan dapat menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahan.

Pembiayaan sekolah/pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilyah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Biaya pendidikan satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda hal ini dikarenakan kebutuhan setiap sekolah dalam menjalankan pendidikan berbeda seperti total gaji guru di sebuah sekolah berbeda dengan sekolah lain disebabkan perbedaan jumlah guru di setiap sekolah berbeda, biaya

perawatan sekolah yang berbeda serta kebutuhan lainnya. Untuk itu diperlukan perencanaan penghitungan kebutuhan sekolah dari berbagai aspek perlu dipertimbangkan dan diputuskan secara bijaksana.

Pembiayaan menurut Yahya ialah mencari dana atau sumber dana dan bagaimana dana itu dimanfaatkan dengan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakan modal kerja serta merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.seddangkan menurut Nanang Fattah (2012) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbgai keperluan penyelenggaraan pendidikan, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai sutu tujuan tertentu.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal pendidikan adalah biaya pendidikan yang mesti dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Upaya pemerintah dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara seperti yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia amandemen IV menyatakan pendidikan dasar wajib diikuti dan pemerintah wajib membiayainya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belnja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional terpenuhi. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan: Pertama biaya langsung sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alatalat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya yang menyebabkan hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. biaya tidak langsung terbagi dua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya pribadi yaitu biaya yang dikeluarkan individu atau keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Biaya masyarakat yaitu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk sekolah.

Ketiga, *monetary cost* adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Keempat. *non monetary Cost* adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang di kel uar kan untuk kegi at an pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuanpendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Standar pembiayaan pendidikan ini diatur dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007, dalam Permendiknas ini mengaturbiaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya baik jalur umum maupun jalur pedidikan berkebutuhan khusus. UU telah merinci beberapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan, Permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan

dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Permendiknas ini memuat standar pembiayaan untuk DKI jakarta, untuk daerah lain, ada yang disebut indeks biaya, yakni angka yang menunjukan perbandingan standar pembiyaan di daerah tersebut terhadap standar biaya di DKI Jakarta.

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mencerminkan bahwa masih jauhnya keterjangkauan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat. Realitanya masyarakat belum sepenuhnya dapat mengenyam pendidikan bermutu hanya didominasi oleh orang-orang dengan golongan atas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak-anak usia sekolah dari golongan bawah tidak menerima pendidikan dengan semestinya yang mengakibatkan mereka menjadi pengangguran, terjadinya kriminalitas dan kemiskinan dimana-mana.

Masyarakat mengharapkan sistem pembiayaan pendidikan dapat mencerminkan ketercapaian mutu pendidikan. Untuk menyikapi tuntutan masyarakat tersebut pemerintah mengadopsi sistem pembiayaan subsisdi silang dimana dalam sistem tersebut diprioritaskan untuk siswa yang tidak memiliki akses kepada pendidikan karena secara ekonomi kurang mampu. Hal ini diatur dalam Pasal 52 huruf f, PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di mana salah satu ketentuannya menetapkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerapkan sistem subsidi silang yang di atur tersendiri oleh satuan pendidikan.

Peranan anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah serta manajemen sekolah secara keseluruhan tentu sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Anggaran pendidikan merupakan pola organisasi yang dirinci menjadi elemen- elemen dari rencana terpadu ke dalam komponen bagian atau departemen yang memudahkan biaya estimasi. Efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara *input* dan *output* atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan, efisiensi pendidikan mempunyai kaitan antara pendayagunaan sumber -sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.

Penyusunan anggaran merupakan salah satu langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan anggaran dapat menggunakan si stem kombi nasi yang merupakan sistem yang lebih baik, karena sistem penganggaran ini telah melalui proses pemilihan kebutuhan yang menjadi prioritas dengan anggaran yang telah ditentukan berdasarkan perkiraan. Metoda penetapan biaya dengan memperkirakan pengeluaran berdasarkan laporan lembaga-lembaga pendidikan, menggunakan SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran). Dalam penggunaan anggaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) harus ada laporan dari biaya; 2) laporan harus dibuat secara uniform, yaitu dengan standar fungsional yang sama; dan 3) laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi l embaga itu. Biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).

Pembiayaan yang efektif dan efisien merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Perlu dibangun rasa saling percaya baik internal pemerintahan maupun antara pemerintah dan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Untuk itu diperlukan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata kunci untuk mewujudkan efektifitas pembiayaan pendidikan. Meskipun pemerintah telah memerikan bantuan operasional sekolah (BOS) namun masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Dana yang diterima setiap sekolah bergantung pada sumber dana, sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. Sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orang tua murid (BIP3), dan masyarakat. Sementara itu, menurut Uhar Suharsaputra sumber dana sekolah biasanya diperoleh dari dua

sumber, yakni dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin dan biaya operasional (terutama untuk sekolah negeri) dan dana dari masyarakat baik dari orang tua siswa maupun dari kelompok masyarakat lainnya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 juga menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Dana pendidikan yang besumber dari Pemerintah Daerah dapat bersumber dari usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan negara (BUMN) Bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral. Dari beberapa uraian pendapat tersebut, dapat diketahuibahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sumber dana pendidikan ada tiga, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak, keuntungan dari eksporbarang dan jasa, dan usaha-usaha negara lainnya. Sedangkan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 50 Ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendanaan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Dalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diteima dari berbagai sumberdana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan alokasi pengeluaran komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Berikut disajikan rekapitulasi anggaran pendidikan:

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Pendidikan

МО	PENERIMAAN		NO	PENGELUARAN	
	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)	100	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Saldo Awal		1	Gaji Pegawai	4
1	Pemerintah Pusat		2	Honor Kesra Pegawai	
	a. Gaji Pegawai		3	Bahan Pelajaran	
	b. SBPP (4 komponen)		4	PBM	
	c. Dana OP (Inpres)		5	Pemeliharaan	
	d. DIK		6	Rehabilitasi Ruang Kelas/	
				Bangunan	
2	Yayasan		7	Pengadaan Sarana/	
	a. Gaji			Prasarana	£
	b. Operasional		8	Kegiatan Ekstrakulikuler	
	c. Pemeliharaan		9	Listrik	
	d. Administrasi		10	Air	
			11	Telepon	
3	Orangtua Siswa		12	Gas	
	a. Uang Pembangunan		13	Air Galon	
	b. SPP		14	Tata Usaha/Administrasi	*
	c. BP3/POMG		15	Pelaporan	-
	d. Ekstrakulikuler		16	Lain-lain	
4	Pemda (APBD)				
5	Masyarakat				
	Jumlah			Jumlah	
				Saldo Akhir	

### KESIMPULAN

Perencanaan sangat membatu dalam menentukan tujuan dalam pencapaian pembiayaan di sekolah terkait dengan opersional pendidikan. pada hakikatnya perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses pembelajaran di

sekolah akan berjalan danterlaksana secara maksimal apabila tujuan akan dicapai memenuhi persyaratan yang telahditentukan sesuai dengan perencanaan (Ananda, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abis, M. (2013). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sdit Assalamah Ungaran*. Semarang: Unnes. Armida. (2011). Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. . *Jurnal Media Akademika*, 26.
- Ananda, R. (2019). Penerapan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *I*(1), 1–10.
- Arifin, A. (2003). Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang Undang Sisdiknas. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag.
- Asfila, Murniati, Nasir Usman. (2015). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah . *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 123-129.
- Baihaqi. (2012). Manajemen Pembiyaan Pada Smkn Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Dedi Ahmad Kurniady. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sma Islam Hasmi Tamansari Bogor. *Bina Manfaat Ilmu, Jurnal Pendidikan*, 74-86.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Donni Juni Priansa & Riski Somad. (2014). *Manajemen Supervisi Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, N. (2012). Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Harsono. (2008). Pembiayaan Pendidikan (Konsep Dasar Mikro, Meso, Dan Makro). Yogyakarta: Surayajaya Press.
- Koswara, E. (2010). *Pengelolaan Manajemenkeuangan Sekolah Yang Efektif* Http://Koswaraero.Blogspot.Com/2021/05/Pengelolaan-Manajemen\_Keuangan Sekolah.Html. Diakses Tanggal 28 Mei 2021 Pada Pukul 19.28 Wib.
- Mantja W. (2008). Etnografi Desain Penelitian Kualitatif Dan Manajemen Pendidikan. Malang: Penerbit Wineka Media.
- M. Hidayat. Ginanjar, Dkk. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sma Islam Hasmi Tamansari Bogor. Bina Manfaat Ilmu: Jurnal Pendidikan, 03(04)
- Mulyasa, E. (2003), Manajemen Berbasis Sekolah, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Priyono, E. (2002). Managing Basic Education (Mbe) Project Rti International-Usaid.
- Raharjo, S. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 301.
- Somantri, M. (2014). Perencanaan Pendidikan. Bandung: Pt Ipb Press.
- Umi Zulfa, (2013). "Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat" (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia), Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 Nopember. Diakses Tanggal 28 Mei 2021 Pada Pukul 19.45.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.